

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pelabuhan Perikanan Pekalongan pada awalnya merupakan Pelabuhan Umum yang telah dikelola oleh Departemen Perhubungan, karena pemanfaatannya telah banyak digunakan oleh kapal-kapal perikanan, sejak Desember 1974 pengelolaan dan asetnya diserahkan kepada Departemen Pertanian cq. Direktorat Jenderal Perikanan dengan diubah statusnya menjadi Pelabuhan Khusus Perikanan. Setelah itu Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perikanan melakukan pembangunan sarana dan prasarana operasional Pelabuhan Perikanan dan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 310/Kpts/Org/5/1978 tanggal 28 Mei 1978 resmi menjadi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26.I/MEN/2001 (UPT) di bidang perikanan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan tanggal 1 Juni 2001, PPN Pekalongan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan, dibidang Prasarana Perikanan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan operasional perikanan tangkap di bidang pengelolaan sumber daya ikan dan pelayanan umum bagi kepentingan nelayan serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;

- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Pelabuhan Perikanan
- b. Sub Bagian Umum
- c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pelabuhan perikanan sebagai entitas publik yang memiliki tugas operasional dan tanggung jawab pengelolaan anggaran, harus melaporkan seluruh aktivitas keuangannya dalam laporan keuangan yang sesuai dengan aturan pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelabuhan terkait erat dengan kewajiban laporan keuangan karena setiap aktivitas membutuhkan sumber daya dan biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Kewajiban ini penting untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik serta mendukung keberlanjutan operasional pelabuhan perikanan.

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Unaudited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan adalah sebagai berikut:

Pendapatan - LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas

kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Perhitungan Penyisihan

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan memperoleh alokasi anggaran pada awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.927.171.000. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal sebanyak 14 kali disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah, revisi administrasi (halaman III DIPA dan pencatatan POK) serta realokasi anggaran (belanja pegawai) sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Berdasarkan kebijakan *automatic adjustment* atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada Pagu Belanja K/L, maka jumlah anggaran PPN Pekalongan Tahun Anggaran 2024 yang diblokir adalah sebesar Rp336.629.000.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. RINCIAN PERUBAHAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	
		Blokir	Pagu Yang Dapat Dipakai
Pendapatan			
Pendapatan PNPB	1.013.271.000	0	1.013.271.000
Jumlah Pendapatan	1.013.271.000	0	1.013.271.000
Belanja			
Belanja Pegawai	5.970.150.000	0	8.187.384.000
Belanja Barang	6.970.349.000	336.629.000	6.293.115.000
Belanja Modal	986.672.000	0	986.672.000
Jumlah Belanja	13.927.171.000	336.629.000	15.467.171.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi Pendapatan
Rp1.353.864.558*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.353.864.558 atau telah mencapai 133,61% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.013.271.000.

Pendapatan tersebut berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.353.864.558 yang terdiri dari Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (4251), Pendapatan Jasa Lainnya (4256) dan Pendapan Lain-lain (4259) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Estimasi Penerimaan	Realisasi	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (4251)	362.500.000	365.920.088	100,94
Pendapatan dan Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan (425121)	0	16.719.000	100
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	0	343.306.990	100
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)	0	5.894.098	100
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI (425151) Fungsional	362.500.000	4.875.000	1,34
Pendapatan Jasa Lainnya (4256)	650.771.000	980.714.759	150,70

	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan (425621) Fungsional	650.771.000	980.714.759	150,70
	Pendapatan Lain-lain (4259)	0	2.354.711	100%
	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)	0	376.691	100
	Penerimaan Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912)	0	1.978.020	100
	Jumlah	1.013.271.000	1.353.864.558	133,61

Sampai dengan 31 Desember 2024 penyumbang penerimaan negara bukan pajak terbesar ada pada akun 4256 Pendapatan Pendapatan Jasa Lainnya yakni sebesar Rp980.714.759 yang keseluruhan berasal Jasa Pelabuhan Perikanan. Ada 3 jenis PNPB terbesar dari Jasa Pelabuhan Perikanan yaitu yang berasal dari Tambat Labuh, Pas Masuk Orang Wisata Bahari dan Kebersihan Kolam Kapal Perikanan.

Ditempat kedua berasal dari akun 4251 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp365.920.088, dengan rincian sebagai berikut :

1. Akun 425121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan Rp.10.582.000 merupakan hasil penjualan melalui lelang atas bongkaran bangunan gedung TPI Higienis dan jaringan listrik TPI Higienis sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 77/09.03/2024 Tanggal 27 Februari 2024 yang merupakan tindak lanjut atas temuan BPK RI Nomor 38/LHP/XVII/02/2009 tanggal 24 Februari 2009 atas Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dan Hasil penjualan sisa bongkaran bangunan gedung kolam renang sesuai Risalah Lelang Nomor 757/09.03/2024-1 Tanggal 6 Nopember 2024 senilai Rp6.137.000;
2. Akun 425122 Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin merupakan hasil penjualan melalui lelang atas 6 Unit kendaraan sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 523/09.03/2024-01 Tanggal 28 Agustus 2024 senilai Rp328.121.490 dan 5 Unit kendaraan sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 728/09.03/2024-01 Tanggal 22 Oktober 2024 senilai Rp15.185.500;
3. Akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berasal dari sewa rumah dinas senilai Rp5.894.098
4. Akun 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI senilai Rp4.875.000 berasal dari sewa forklift dan aula.

Sedangkan jika dibandingkan antara estimasi belanja dengan realisasi pendapatan tahun berjalan, terdapat realisasi yang melebihi estimasi sebesar 33,61%. Penyebab tercapainya kelebihan realisasi PNPB tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya kenaikan Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan dengan 3 jenis pendapatan terbesar berupa Pendapatan dari Kebersihan Kolam Kapal Perikanan, Pas Masuk Wahana Edukasi Air dan Pas Masuk Roda 4

Wisata Bahari serta adanya pendapatan dari sewa forklift dan aula (Balai Pertemuan);

2. Adanya kenaikan nilai sewa rumah negara per bulan sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 yang dituangkan dalam Surat Izin Penggunaan Rumah Dinas Nomor B.1032/PPN.PKL/KP.630/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 an. Kartono dan Nomor B.1033/PPN.PKL/KP.630/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 an. Jajang H.;
3. Adanya Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang berasal dari pengembalian uang makan dan tunjangan kinerja Bulan Desember 2023 yang disetorkan ke kas negara pada Bulan Januari 2024 dan Penerimaan Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang berasal dari Kekurangan Volume Rabat Beton Mess dan Paving Block Pada Pekerjaan Pemeliharaan Taman Wisata Bahari berdasarkan Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan Tahun Anggaran 2023-2024 Nomor R.153/ITJ.2/HP.130/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni senilai Rp722.552.726 atau sebesar 154,02%. Terdapat kenaikan penerimaan sebesar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Rincian sebagai berikut:

Tabel 3. PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik/ Turun	%
Pendapatan Umum				
Pendapatan dan Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	10.582.000	0	10.582.000	0
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	328.121.490	28.599.999	299.521.491	1.047,28
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4.420.606	696.429	3.724.177	534,75
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	376.691	1.960.481	-1.583.790	0
Penerimaan Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.978.020	0	1.978.020	(80,79)
Pendapatan Fungsional				
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI	4.375.000	4.095.000	280.000	6,84
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	841.813.264	433.762.436	408.050.828	94,07
Jumlah	1.191.667.071	469.114.345	722.552.726	154,02

B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Rp14.874.723.113

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.874.723.113 atau 96,17% dari anggaran belanja sebesar Rp.15.467.171.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024				
	Anggaran	Belanja	Pengembalian Belanja	Belanja Netto	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	8.187.384.000	8.025.041.658	1.121.285	8.023.820.368	98,00
Belanja Gaji dan Tunjangan (511)	4.323.238.000	4.161.158.248	1.121.285	4.159.936.963	96,22
Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (512)	3.864.146.000	3.863.883.405	0	3.863.883.405	99,99
Belanja Barang	6.293.115.000	5.889.423.981	1.984.743	5.887.439.238	93,55
Belanja Barang (521)	1.378.762.000	1.360.449.541	1.458.000	1.358.991.541	98,57
Belanja Jasa (522)	1.796.336.000	1.794.413.886	526.743	1.793.887.143	99,86
Belanja Pemeliharaan (523)	2.262.845.000	1.925.917.184	0	1.925.917.184	85,11
Belanja Perjalanan Dinas (524)	855.172.000	808.643.370	0	808.643.370	94,56
Belanja Modal	986.672.000	963.463.507	0	963.463.507	97,65
Belanja Modal Tanah (531)	69.900.000	49.867.279	0	49.867.279	71,34
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532)	430.464.000	429.383.800	0	429.383.800	99,75
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (534)	486.308.000	484.212.428	0	484.212.428	99,57
Jumlah	15.467.171.000	14.877.829.141	3.106.028	14.874.723.113	96,17

Realisasi anggaran per 31 Desember 2024 berasal dari realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Realisasi Belanja Pegawai berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan (511) dan Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (512).

Realisasi Belanja Barang berasal dari Belanja Barang (521), Belanja Jasa (522), Belanja Pemeliharaan (523), dan Belanja Perjalanan Dinas (524).

Sedangkan realisasi Belanja Modal berasal dari Belanja Modal Tanah (531), Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532) dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (534).

Jika dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan senilai 0,66% atau sebesar Rp99.563.714. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2023, jumlah nominal penurunan berasal dari belanja barang yakni senilai Rp.2.496.345.849 atau sebesar 29,77%. untuk belanja modal dan belanja pegawai justru mengalami kenaikan. Kenaikan belanja modal senilai Rp.311.724.165 atau sebesar 47,83%. dan belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar 35,11% atau senilai Rp.2.085.057.970. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penurunan Belanja Barang karena adanya perubahan kebijakan pembayaran honorarium petugas pendataan yang awalnya dikelola oleh satker, menjadi dikelola oleh direktorat kepelabuhanan.

Berikut perbandingan rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023:

Tabel 5. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik/ Turun	%
Belanja Pegawai	8.023.820.368	5.938.762.398	2.085.057.970	35,11
Belanja Barang	5.887.439.238	8.383.785.087	-2.496.345.849	(29,78)
Belanja Modal	963.463.507	651.739.342	311.724.165	47,83
Jumlah	14.874.723.113	14.974.286.827	99.563.714	0,66

B.3 Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp8.023.820.368*

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.023.820.368 dan Rp5.938.762.398. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 35,11 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan 15 orang PPPK dalam kurun waktu 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024 (6 orang per 1 Juli 2023, 7 orang per 1 Oktober 2023 dan 2 orang per 1 Maret 2024).
2. Adanya penambahan 6 orang PNS yang masuk dalam kurun waktu yang sama.

3. Adanya kebijakan pembayaran Tunjangan Kinerja 13 dan 14 yang pada tahun 2024 dibayarkan 100%.

Tabel 6. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA PEGAWAI TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik/ Turun	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.857.411.495	5.220.411.385	637.000.110	12,20
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	2.167.530.158	720.518.262	1.447.011.896	200,83
Jumlah Belanja Kotor	8.024.941.653	5.940.929.647	2.084.012.006	35,08
Pengembalian Belanja Pegawai	1.121.285	2.167.249	-1.045.964	-48,26
Jumlah Belanja	8.023.820.368	5.938.762.398	2.085.057.970	35,11

Komposisi pegawai per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. KOMPOSISI PEGAWAI PER 31 DESEMBER 2024

No	Jabatan	Golongan (PNS)				Golongan (PPPK)			Total	Pendidikan								Total	
		I	II	III	IV	V	VII	IX		SD	SMP	SMA	D-3	D4	S1	S2			
1	Kepala Pelabuhan				1				1							1	1		2
	Kepala Subbagian Umum			1					1						1	1	1		3
	Syahbandar Pelabuhan Perikanan			5					5				4	1			5		4
	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana			1					1					1		1		4	
	Manajemen Barang Milik Negara			2					2				2			2		5	
	Manajemen Data			1					1				1		1		6		
	Manajemen Kesyahbandaran			4					4			1	3		4		7		
	Manajemen Keuangan			2					2			1	1			2		8	
	Manajemen Penataan Sarana dan Prasarana	2	4						6	1	4			1		6		9	
	Manajemen Informasi Media		1						1					1		1	10		
	Manajemen Data dan Informasi			1					1			1				1	11		
	Manajemen Sarana dan Prasarana		1	1					1							1	12		
	Sub Total	6	3	23	1				27	6	1	8	2	4	11	1	27		
	Manajemen Keuangan APBN			1					1					1		1		14	
	Manajemen Keuangan APBN			1					1					1		1		15	
	Manajemen								1									16	
	Manajemen		1						1							1		17	
	Manajemen Produksi			4					4	3	1				4			18	
	Manajemen Mahir																	19	
	Manajemen Produksi Pemula				7				7						7			20	
	Manajemen Produksi		3			2			5						5			21	
	Manajemen rampil									1	4							22	
	Manajemen Perikanan		4						4				2	2	4			23	
	Manajemen		5		6	11				6	5			11				24	
	Manajemen				1	1					1			1				25	
	Manajemen		1			1				1				1				26	
	Manajemen					1					1							27	
	Manajemen					1				1								28	
	Manajemen		2			2			2									29	
	Manajemen	6	5	16	7	2	9	42	6	11	7	6	13	2	42			30	
	Manajemen	6	8	39	1	7	2	9	69	6	1	19	9	10	24	3	69		
	Manajemen																	31	
	Manajemen																	32	
	Manajemen																	33	
	Manajemen																	34	
	Manajemen																	35	
	Manajemen																	36	
	Manajemen																	37	
	Manajemen																	38	
	Manajemen																	39	
	Manajemen																	40	
	Manajemen																	41	
	Manajemen																	42	
	Manajemen																	43	
	Manajemen																	44	
	Manajemen																	45	
	Manajemen																	46	
	Manajemen																	47	
	Manajemen																	48	
	Manajemen																	49	
	Manajemen																	50	
	Manajemen																	51	
	Manajemen																	52	
	Manajemen																	53	
	Manajemen																	54	
	Manajemen																	55	
	Manajemen																	56	
	Manajemen																	57	
	Manajemen																	58	
	Manajemen																	59	
	Manajemen																	60	
	Manajemen																	61	
	Manajemen																	62	
	Manajemen																	63	
	Manajemen																	64	
	Manajemen																	65	
	Manajemen																	66	
	Manajemen																	67	
	Manajemen																	68	
	Manajemen																	69	
	Manajemen																	70	
	Manajemen																	71	
	Manajemen																	72	
	Manajemen																	73	
	Manajemen																	74	
	Manajemen																	75	
	Manajemen																	76	
	Manajemen																	77	
	Manajemen																	78	
	Manajemen																	79	
	Manajemen																	80	
	Manajemen																	81	
	Manajemen																	82	
	Manajemen																	83	
	Manajemen																	84	
	Manajemen																	85	
	Manajemen																	86	
	Manajemen																	87	
	Manajemen																	88	
	Manajemen																	89	
	Manajemen																	90	
	Manajemen																	91	
	Manajemen																	92	
	Manajemen																	93	
	Manajemen																	94	
	Manajemen																	95	
	Manajemen																	96	
	Manajemen																	97	
	Manajemen																	98	
	Manajemen																	99	
	Manajemen																	100	
	Manajemen																	101	
	Manajemen																	102	
	Manajemen																	103	
	Manajemen																	104	
	Manajemen																	105	
	Manajemen																	106	
	Manajemen																	107	
	Manajemen																	108	
	Manajemen																	109	
	Manajemen																	110	
	Manajemen																	111	
	Manajemen																	112	
	Manajemen																	113	
	Manajemen																	114	
	Manajemen																	115	
	Manajemen																	116	
	Manajemen																	117	
	Manajemen																	118	
	Manajemen																	119	
	Manajemen																	120	
	Manajemen																	121	
	Manajemen																	122	
	Manajemen																	123	
	Manajemen																	124	
	Manajemen																	125	
	Manajemen																	126	
	Manajemen																	127	
	Manajemen																	128	
	Manajemen																	129	
	Manajemen																	130	
	Manajemen																	131	
	Manajemen																	132	
	Manajemen																	133	
	Manajemen																	134	
	Manajemen																	135	
	Manajemen																	136	

B.4 Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang
Rp5.887.439.238*

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.887.439.238 dan Rp8.383.785.087. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 29,78% dari Realisasi TA 2023. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi belanja tersebut:

Tabel 8. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA BARANG PER 31 DESEMBER TA 2024 DAN TA 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik/ Turun	%
Belanja Barang Operasional	715.941.753	888.271.715	-172.329.962	-19,40
Belanja Barang Non Operasional	509.124.788	568.893.667	-59.768.879	-10,51
Belanja Persediaan Barang Konsumsi	135.383.000	110.545.700	24.837.300	22,47
Belanja Jasa	1.794.413.886	2.986.859.403	-1.192.445.517	39,92
Belanja Pemeliharaan	1.925.917.184	2.605.811.152	-679.893.968	-26,09
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	808.643.370	1.230.063.450	-1.230.063.450	-34,26
Jumlah Belanja Kotor	5.889.423.981	8.390.445.087	-2.501.021.106	-29,81
Pengembalian Belanja Barang	1.984.743	6.660.000	-4.675.257	-70,20
Jumlah Belanja	5.887.439.238	8.383.785.087	-2.496.345.849	-29,78

Penyebab kenaikan/penurunan pada masing-masing belanja adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Belanja Barang Operasional diantaranya akibat adanya pengurangan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 2 orang.
2. Penurunan Belanja Barang Non Operasional diantaranya akibat belum terealisasinya beberapa kegiatan yang sumber dananya berasal dari PNBK.
3. Kenaikan Belanja Persediaan Barang Konsumsi diantaranya akibat adanya penambahan persediaan untuk operasional petugas pendataan yang ditempatkan Pekalongan, Tegalsari, Bajomulyo, Klidang Lor dan Tasik Agung. Berikut rincian barang persediaan per 31 Desember 2024:

Tabel 9. RINCIAN BARANG PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2024

NO.	URAIAN	NILAI	KONDISI
1	binder clip 105	15.400	Baik
2	binder clip 206	43.000	Baik
3	post it sedang	6.750	Baik
4	typex	76.000	Baik
5	binder clip 107	8.300	Baik
6	binder clip 155	8.250	Baik
7	perforator no.30XL	20.500	Baik

8	HVS 70 F4 SIDU	399.000	Baik
9	stop map folio kop	5.000	Baik
10	Blanko SPB	1.850.000	Baik
11	Blanko Pemeriksaan Administratif	143.000	Baik
12	Blanko Pembebasan SPB	71.500	Baik
13	PM Parkir Roda 6 WB	220.000	Baik
14	PM Parkir Roda 10 WB	220.000	Baik
15	PM Parkir Roda 10 lebih WB	220.000	Baik
16	Karcis Pas Masuk TPI	165.000	Baik
17	Logbook Kesyahbandaran	143.000	Baik
18	Pernyataan Nahkoda	71.500	Baik
19	Persetujuan berlayar	2.775.000	Baik
20	Hasil Pemeriksaan Autis	71.500	Baik
21	Master Siling	286.000	Baik
22	Form Daftar Nahkoda dan ABK	71.500	Baik
23	Dokumen Persetujuan Olah Gerak Kapal	214.500	Baik
24	STBLK Kedatangan Kapal	850.000	Baik
25	Logbook Penangkapan Ikan	332.000	Baik
26	PM Parkir roda 10 TPI	220.000	Baik
27	PM Parkir roda 6 TPI	148.500	Baik
28	PM Parkir Bus TPI	220.000	Baik
29	Blanko Perbekalan Kapal	1.700.000	Baik
30	Blanko Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar	357.500	Baik
31	Blanko Kop	850.000	Baik
32	Karcis Masuk TPI roda 4	300.000	Baik
33	Kertas HVS 70 gram (kwarto)	330.000	Baik
34	HVS A4 70 g SIDU	290.000	Baik
35	Tinta Toner HP 05A	435.000	Baik
36	Refill Epson	240.000	Baik
37	Tinta durabrite	200.000	Baik
38	Tintoner Kompatable	480.000	Baik
39	Flash disk 16 giga	80.000	Baik
Jumlah		14.137.700	

4. Penurunan belanja jasa diantaranya akibat perubahan kebijakan pembayaran honor kontrak perorangan petugas pendataan sebanyak 48 orang yang tadinya dikelola oleh satker, mulai tahun 2024 dilaksanakan oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
5. Penurunan Belanja Pemeliharaan diantaranya akibat adanya kebijakan penghentian penggunaan barang-barang yang rusak sehingga tidak dilakukan pemeliharaan lagi atas barang-barang tersebut.
6. Penurunan Belanja Perjalanan Dinas diantaranya akibat adanya beberapa kegiatan yang dilakukan secara online (*zoom*) maupun hibrid sehingga peserta kegiatan tidak harus menghadiri secara langsung (*offline*).

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Rp963.463.507

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp963.463.507 dan Rp651.739.342. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 47,83% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh adanya kenaikan belanja modal Tanah sejumlah Rp49.867.279,- (100%) yang merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses pensertifikatan tanah hasil reklamasi seluas 8,284 m2, Belanja Modal Peralatan

dan Mesin sebesar Rp.206.547.610,- (92,69%) dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sejumlah Rp.55.309.276,- (12,90%)

Tabel 10. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik/ Turun	%
Belanja Modal Tanah	49.867.279	-	49.867.279	100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	429.383.800	222.836.190	206.547.610	92,69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	484.212.428	428.903.152	55.309.276	12,90
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	669.375.774	623.727.440	45.648.334	47,83
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	669.375.774	623.727.440	45.648.334	47,83

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah
Rp49.867.279

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp49.867.279 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan TA 2023 . Hal ini disebabkan oleh terdapat transaksi penambahan pada Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah hasil reklamasi seluas 8.284 m2 yang terletak di timur sungai loji.

Tabel 11. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA TANAH TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik/ Turun	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	49.867.279	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	49.867.279	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	49.867.279	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Realisasi Belanja
Modal Peralatan dan
Mesin Rp429.383.800*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp429.383.800 dan Rp222.836.190, mengalami kenaikan sebesar 111,91 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya pembelian peralatan dan mesin sebagai berikut : 1 unit pompa air submersible; 13 unit kursi besi/metal; 1 unit sice/sofa; 4 unit bangku panjang besi/metal; 11 unit meja rapat lipat; 3 Unit Dispenser Polytron PWC 778 WUH; 3 unit AC Panasonic 1 PK YN9WKJ; 4 unit AC Panasonic 1,5 PK YN12WKJ; 4 unit AC Panasonic 2 PK YN18WKJ dan 1 unit Televisi LG 50 Inchi 50UR8050PSB; 1 unit alat surveillance (drone); 3 unit laptop; 3 unit PC; 5 unit personal computer lainnya (samsung galaxy tablet) dan 1 unit printer.

Tabel 12. PERBANDINGAN REALIASI BELANJA PERALATAN DAN MESIN TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik/ Turun	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	429.383.800	202.624.190	226.759.610	111,91
Jumlah Belanja Kotor	429.383.800	202.624.190	226.759.610	111,91
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	429.383.800	202.624.190	226.759.610	111,91

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Realisasi Belanja
Modal Gedung dan
Bangunan Rp0*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari tidak adanya transaksi penambahan maupun pengurangan pada belanja modal ini.

Tabel 13. PERBANDINGAN REALIASI BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik/ Turun	%
Renovasi Gedung Kantor	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-

Jumlah Belanja Modal	~	~	~	~
----------------------	---	---	---	---

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja
Modal, Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp484.212.428

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp484.212.428 dan Rp428.903.152, sebesar 12,90 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan tidak adanya transaksi penambahan maupun pengurangan pada belanja modal ini..

Tabel 14. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik/Turun	%
Belanja Modal Jaringan	484.212.428	428.903.152	55.509.276	12,90
Jumlah Belanja Kotor	484.212.428	428.903.152	55.509.276	12,90
Pengembalian Belanja Modal				
Jumlah Belanja Modal	484.212.428	428.903.152	55.509.276	12,90

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar Rp0

Jumlah Aset Lancar Per Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Tabel 15. JUMLAH KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uang Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Sumber Dana Rupiah Murni (RM)	0	0
Sumber Dana Rupiah Murni (RM)	0	0
Jumlah	0	0

Tabel 16. RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai di brankas	0	0
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. Rekening 653312391711000	0	0
Jumlah	0	0

Tidak ada saldo yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 karena seluruh sisa Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan telah disetor ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2024. Berikut rincian jumlah dan nomor NTPN penyetoran sisa Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan :

Tabel 17. RINCIAN PENGEMBALIAN UANG PERSEDIAAN PADA BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2024

NTPN	Jumlah	Tanggal Bayar
39CDD1GCAN0HU97O	5.661.243,00	31-12-2024 12:15:59
4E87E1GCAN0HU961	22.084,00	31-12-2024 12:15:11
1565B397AC5AO92E	39.440.134,00	31-12-2024 12:17:37
AD222397AC5AO91R	1.485.927,00	31-12-2024 12:16:33
Jumlah	0	0

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 18. RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	~	~
Rekening Bank	~	~
Jumlah	~	~

Tidak ada saldo yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024, hal ini disebabkan antara lain:

1. Tidak adanya rekening penampungan
2. Semua PNBPN yang diterima oleh Bendahara Penerimaan disetor langsung kas negara

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp660.605*

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp660.605 dan Rp376.691. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 19. PERBANDINGAN PIUTANG BUKAN PAJAK TA 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	660.605	376.691
Jumlah	660.605	376.691

Rincian Piutang lainnya senilai Rp660.605 berasal dari pengembalian Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Bulan Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20. TABEL RINCIAN PIUTANG LAINNYA TA.2024

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
1	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Kartono, A.Pi, M.P	29.527
2	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Andik Orbaniyanto	84
3	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Andreas Goenanta Singarimbun, A.Md.S.I.	9.815
4	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Dias Widihananto, A.Md.	18.956
5	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Eko Noviwiji Suharyanto, A.Md., S.M.	13.714
6	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Farid Setiyanto, S.Pi.	548
7	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Herry Bertus Dwi Agus Sukriyono	505
8	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Indarti Wahyuningsih, A.Md, S.M	19.410
9	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Kadar, A.Md	18.956
10	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Muhammad Adi Kurniawan, S.T.	12.407
11	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Wahnoto	169.250
12	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Agung Ananda	602
13	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Bayu Aji Laksono	1.015
14	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Dinar Prasetyo Himawan	827
15	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Dwiyono	113
16	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Fitra Hamim, S. Kom	96.498

17	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Rizki Atikha, S.I.Kom	8.462
18	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Ardhitya Faryndra, S.St.Pi	564
19	Pengembalian Uang Makan Desember 2024 A.n. Ardhitya Faryndra, S.St.Pi	37.000
20	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Suwarni	885
21	Pengembalian Uang Makan Desember 2024 A.n. Suwarni	74.000
22	Pengembalian Tukin Desember 2024 A.n. Sutrisno	1.467
23	Pengembalian Uang Makan Desember 2024 A.n. Sutrisno	35.000
24	Pengembalian Uang Makan Desember 2024 A.n. Jajang Hartono, A.Pi	37.000
25	Pengembalian Uang Makan Desember 2024 A.n. Joko Rianto, S.Pi, M.Pi	74.000
Jumlah		606.605

C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp3.303

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitor.

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.303 dan Rp1.883. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum

diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	660.605	0.5%	3.303
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	660.605		3.303

C.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0

Beban Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp273.136.408

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar Rp273.136.408. dan Rp126.545.155. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya.

Perbandingan rincian Penerimaan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. PERBANDINGAN RINCIAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA TA 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	273.136.408	126.545.155
Jumlah	273.136.408	126.545.155

Berdasarkan data pada tabel diatas, pada tahun 2024 terdapat pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp.273.136.408. Angka tersebut merupakan perhitungan yang berasal dari jasa tambat labuh dan kebersihan kolam atas 30 kapal yang masih berada dalam kolam pelabuhan sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Internal Jasa Tambat Labuh tanggal 31 Desember 2024. (rincian terlampir).

C.1.10 Persediaan

Persediaan
Rp25.548.750

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp25.548.750 dan Rp11.923.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut::

Tabel 22. PERBANDINGAN PERSEDIAAN TA 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	25.548.750	11.923.000
Barang untuk Pemeliharaan	~	~
Jumlah	25.548.750	11.923.000

Persediaan tersebut di atas dalam Persediaan senilai Rp.25.548.750,- dalam kondisi baik (rincian terlampir) :

Tabel 23. RINCIAN PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	NILAI	KONDISI
1	ballpoint	21.000	Baik
2	pensil 2b	40.000	Baik
3	binder clip 105	7.700	Baik
4	clip seagul	12.000	Baik
5	typex	76.000	Baik
6	Binder clip 107	21.800	Baik
7	Binder Clip 155	8.250	Baik
8	HVS 70 F4 SIDU	133.000	Baik
9	Lakban Ht 11/2	33.000	Baik
10	K.photo vitec 210 gr	20.000	Baik
11	balpen boliner pilot	39.000	Baik
12	Gunting Kenko Besar	32.000	Baik
13	Isi cater kecil	8.000	Baik
14	termal 80x80 printec	175.000	Baik
15	Tipex kenko kertas	57.000	Baik
16	Post it big 1/5	7.000	Baik
17	Dobel tape	72.500	Baik
18	lem stick 25 gram	31.000	Baik
19	calculator CT 500	41.500	Baik
20	Re type "Fluid set"	7.500	Baik
21	stop map folio kop	217.500	Baik

22	Odner folio	70.000	Baik
23	Ordner bantex F4	50.000	Baik
24	Stopmap	30.000	Baik
25	Staples hd 10	21.500	Baik
26	Isi staples 13/8	186.000	Baik
27	Blangko SPB	925.000	Baik
28	blangko pernyataan nakhoda	786.500	Baik
29	blangko pemeriksaan administratif	143.000	Baik
30	blangko pemeriksaan nautis	357.500	Baik
31	blangko pemberbasan SPB	715.000	Baik
32	PM Parkir Roda 6 WB	220.000	Baik
33	PM Parkiir roda 10 WB	220.000	Baik
34	PM parkir roda 10lebih WB	220.000	Baik
35	karcis pas masuk TPI	165.000	Baik
36	Logbook Kesyahbandaran	143.000	Baik
37	Pernyataan Nakhoda	71.500	Baik
38	Persetujuan berlayar	1.295.000	Baik
39	Hasil Pemeriksaan Nautis	71.500	Baik
40	Master Siling	715.000	Baik
41	orm Datar Nakhoda dan ABK	720.000	Baik
42	blangko dok. crewlist	1.530.000	Baik
43	Dok. Persetujuan Olah Gerak Kapal	214.500	Baik
44	STBLK Kedatangan Kapal	850.000	Baik
45	LOGBOOK PENANGKAPAN IKAN	332.000	Baik
46	Tally Sheet Bongkar Kapal Landscape	1.800.000	Baik
47	Tally Sheet Bongkar Kapal Potrait	1.800.000	Baik
48	PM Parkir roda 10 TPI	220.000	Baik
49	PM Parkir roda 6 TPI	148.500	Baik
50	PM Parkir Bus TPI	220.000	Baik
51	Blangko perbekalan kapal	850.000	Baik
52	Blangko Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar	357.500	Baik
53	Blangko Kop	850.000	Baik
54	Karcis Masuk TPI Roda 4	300.000	Baik
55	Form Sensus Cumi	374.000	Baik
56	Form Sensus Ikan	374.000	Baik
57	kertas hvs 70 gram (kwarto)	530.000	Baik
58	HVS A4 70 g Sidu	882.500	Baik
59	Kertas HVS 80 gram Folio	66.000	Baik
60	Amplop PPL Sedangg	101.000	Baik
61	tinta toner HP laserjet	870.000	Baik
62	tinta ulang hp premium	160.000	Baik
63	Tinta Toner HP 05A	435.000	Baik
64	Tinta epson 003 BK	231.000	Baik
65	Refill Epson	800.000	Baik
66	tinta durabrite	1.000.000	Baik

67	tinta toner compatable	145.000	Baik
68	Tinta Epson Ori	600.000	Baik
69	Tinta Epsen	120.000	Baik
70	Tintoner Kompatable	480.000	Baik
71	Tinta epson 003 WR	346.500	Baik
72	flash disk 8 giga	140.000	Baik
73	flash disk 16 giga	80.000	Baik
74	mouse wireles	155.000	Baik
Jumlah		25.548.750	

C.2 Aset Tetap

Aset Tetap
Rp72.689.191.578
belum

Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp72.689.191.578 dan Rp71.150.128.183.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Akuntansi Bogor berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1 Tanah

Tanah
Rp35.882.691.279

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp35.882.691.279 dan Rp35.832.824.000. Nilai Tanah tersebut Terdapat penambahan aset tanah yang merupakan hasil reklamasi seluas 8.284 m2 yang terletak di timur sungai loji.. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24. RINCIAN TANAH PER 31 DESEMBER 2024

<i>(dalam Rupiah)</i>			
No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	Tanah Mess Operator 2.800 m2	Pekalongan	5.152.458.000
2	Tanah Rumah Dinas 250 m2	Pekalongan	550.113.000
3	Tanah Pelabuhan Baru 47.400 m2	Pekalongan	10.317.212.000
4	Tanah Belakang Kantor 2.452 m2	Pekalongan	4.512.081.000
5	Tanah Hasil reklamasi 8.284 m2	Pekalongan	49.867.729
Jumlah			35.882.691.729

Tidak ada bidang tanah yang dikuasai/digunakan oleh Pihak Ketiga.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp14.659.736.091

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp14.659.736.091 dan Rp12.646.547.591.

Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:.

Rncian mutasi Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 25. RINCIAN MUTASI PERALATAN DAN MESIN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2024	12.646.547.591
Mutasi tambah:	
Pembelian	429.383.800
Hibah	0
Transfer Masuk	2.747.518.500
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	-1.161.088.300
Saldo Per 31 Desember 2024	14.662.361.591
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-11.480.088.573
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	3.182.273.018

A. Transaksi mutasi tambah peralatan dan mesin berupa:

1. Pembelian peralatan dan mesin dengan rincian:

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Nilai
1	Pompa air	Unit	1	68.953.200
2	Kursi Besi /Metal	Buah	13	18.903.300
3	Sice/Sofa	Buah	1	31.246.500
4	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	4	6.748.800
5	Meja Rapat Lipat	Buah	11	20.634.900
6	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	11	95.637.600
7	Televisi LG 50 Inchi	Buah	1	8.991.000
8	Dispenser	Buah	3	9.823.500
9	Alat surveillance	Buah	1	29.200.000
10	PC Unit	Buah	3	44.850.000
11	Personal Komputer Lainnya	Unit	5	92.500.000
12	Printer	Unit	1	1.895.000
Jumlah				429.383.800

2. Transfer Masuk dengan rincian :

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Nilai
1	Crawler Excavator + Attachment	Unit	1	1.979.000.000
2	Sepeda Motor	Unit	1	19.900.000
Jumlah				1.998.900.000

B. Transaksi mutasi kurang peralatan dan mesin berupa:

1. Penghentian Aset dari Penggunaan dengan rincian :

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Nilai
1	Forklift	Unit	1	671.277.200
2	Station Wagon	Unit	2	326.733.000
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	55.000.000
4	Truck + Attachment	Unit	1	62.171.000
5	Alat Prosesing Daging	Buah	1	924.000
6	Lemari Kayu	Buah	7	5.104.000
7	Rak Kayu	Buah	10	4.928.000
8	Lemari Display	Buah	1	968.000
9	Tabung Pemadam Api	Buah	8	6.365.500
10	Meja Kerja Kayu	Buah	14	13.521.200
11	Meja Komputer	Buah	1	550.000
12	Meja Telepon	Buah	1	11.000
13	Exhause Fan	Buah	12	5.900.400
14	Panci	Buah	2	1.419.000
15	Megaphone	Buah	2	946.000
16	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Buah	2	1.750.000
17	Solid Material Handling Equipment Lainnya	Buah	4	3.520.000
Jumlah				1.161.088.300

C.2.3 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp17.739.711.884*

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.739.711.884 dan Rp17.739.711.884.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 26. RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN TA 2024

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Saldo Nilai Perolehan 1 Januari 2024	17.739.711.884
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	-
Mutasi Kurang:	-

Saldo Per 31 Desember 2024	17.739.711.884
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-3.451.244.764
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	14.288.467.120

Tidak ada mutasi tambah dan kurang sampai dengan periode pelaporan ini.

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp32.474.762.395

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.32.474.762.395 dan Rp.31.790.872.967. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 27. RINCIAN MUTASI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 1 Januari 2024	31.790.872.967
Mutasi tambah:	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kualitas	199.677.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	0
Saldo Per 31 Desember 2024	31.990.549.967
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-13.854.403.268
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	18.136.146.699

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- berasal dari koreksi pencatatan nilai bertambah pada NUP 1 (Jalan Khusus Komplek) senilai Rp.199.677.000,- sesuai Laporan Hasil Audit Kinerja Nomor : R.153/ITJ.2/HP.130/VI/2024 Tanggal 3 Juni 2024

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- tidak ada mutasi kurang pada periode semester ini

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp29.810.000

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.29.810.000 dan Rp.29.810.000, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 1 Januari 2024	29.810.000
Mutasi tambah:	
~	~
Mutasi Kurang:	
~	~
Saldo Per 31 Desember 2024	29.810.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	~
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	29.810.000

Aset tetap tersebut berupa Maket/Miniatur/Replika dan tidak ada mutasi tambah aset tetap lainnya selama periode pelaporan ini.

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak ada KDP sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	~
Mutasi tambah:	
Pengembangan KDP	~
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar BMN Hilang Yang Sudah Diusulkan ke Pengelola	~
	~
Saldo per 31 Desember 2024	~

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp29.046.162.675

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp29.046.162.675 dan Rp26.889.638.259.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain

untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 29. RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	14.659.736.091	(11.480.088.573)	3.179.647.518
2.	Gedung dan Bangunan	17.739.711.884	(3.711.670.834)	14.028.041.050
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.474.762.395	(13.854.403.268)	18.620.359.127
4.	Aset Tetap Lainnya	29.810.000	-	29.810.000
	Jumlah	64.904.020.370	(29.046.162.675)	35.857.857.695

C.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp0

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

C.3.1 Dana Yang dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp150.064.000

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp150.064.000 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 30. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Uraian	TA 2024	TA 2023
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	150.064.000	-
~	~	~
Total	150.064.000	

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) atas Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan dan Pengemudi TA 2024 Volume 1 Paket Termin XII (Bulan Desember 2024) sesuai BAST No.1661/PPN.PKL/KPA/PL.420/XII/2024 Tanggal 31-12-2024 dan BAP No.1663/PPN.PKL/KPA/PL .420/XII/2024 Tanggal 31-12-2024 dan Jasa Outsourcing Tenaga Keamanan TA 2024 Volume 1 Paket Termin XII (Bulan Desember 2024) sesuai BAST

No.1662/PPN.PKL/KPA/PL.420/XII/2024 Tanggal 31-12-2024 dan BAP No.1664/PPN.PKL/KPA/PL.420/XII/2024 Tanggal 31-12-2024.

C.3.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp3.547.325.500

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp3.547.325.500 dan Rp18.062.136.758.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Tabel 31. RINCIAN MUTASI ASET LAIN-LAIN

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 1 Januari 2024	18.062.136.758
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	1.161.088.300
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo Per 31 Desember 2024	19.223.225.058
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(3.547.325.500)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	15.675.899.558

C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp3.547.325.500

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp3.547.325.500 dan Rp17.477.483.547. Akumulasi Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp3.547.325.500 dan Rp17.477.483.547.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut::

Tabel 32. RINCIAN AKUMULASI AMORTISASI DAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
----	--------------	-----------------	----------------------	------------

A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
B.	Aset Lain-lain	3.547.325.500	(3.547.325.500)	-
	Jumlah	3.547.325.500	(3.547.325.500)	-
	Total	3.547.325.500	(3.547.325.500)	-

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp167.956.445 dan Rp18.784.546.

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp167.956.445

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp167.956.445 dan Rp18.784.546.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 33. RINCIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TA 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	17.892.445
2.	Utang kepada pihak ketiga lainnya	150.064.000
3.	Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	-
	Total	167.956.445

Terdapat utang pada pihak ketiga yang terdiri dari:

1. Beban Barang yang Masih Harus Dibayar senilai Rp.17.892.445 berasal dari jurnal manual (akrual) atas beban pemakaian listrik dan telepon bulan Desember 2024 yang dibayarkan tahun 2025
2. Utang Pihak Ketiga Lainnya senilai Rp.150.064.000 merupakan RPATA atas : Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan dan Pengemudi TA 2024 Volume 1 Paket Termin XII (Bulan Desember 2024) sesuai BAST No.1661/PPN.PKL/KPA/PL.420/XII/2024 Tanggal 31-12-2024 dan BAP No.1663/PPN.PKL/KPA/PL.420/XII/2024 Tanggal 31-12-2024 dan Jasa Outsourcing Tenaga Keamanan TA 2024 Volume 1 Paket Termin XII

(Bulan Desember 2024) sesuai BAST No.1662/PPN.PKL/KPA/PL.420/XII/2024 Tanggal 31-12-2024 dan BAP No.1664/PPN.PKL/KPA/PL.420/XII/2024 Tanggal 31-12-2024 yang dibayarkan bulan Januari 2025.

C.4.2 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Penjelasan Uang Muka dari KPPN Merupakan Uang Persediaan dengan sumber dana masing-masing sebagai berikut : Rupiah Murni sebesar Rp.48.000.000,- (KKP dan Tunai) dan PNBPN sebesar Rp.3.000.000, telah disetorkan ke kas negara sehingga saldo per 31 Desember 2024 sudah nihil. Dengan bukti setor sebagai berikut :

Tabel 34. RINCIAN UANG MUKA DARI KPPN PER 31 DESEMBER 2024 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Nomor	Sumber Dana	No Billing	Tanggal Setor
Uang Persediaan	RM	702412312061006	31.12.2024
Uang Persediaan	PNBP	702412312061176	31.12.2024

C.4.3 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

C.4.4 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35. RINCIAN BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR TA 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0
2.	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
3.	Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	0
Total		515.987.655

C.5 Ekuitas

Ekuitas
Rp72.021.999.999

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp72.021.998.989. dan Rp71.854.839.811.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp1.138.075.110*

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.138.075.110 dan Rp1.318.232.263. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 13,67. Hal tersebut disebabkan oleh Realisasi pendapatan pada akun 425131 bersumber dari sewa rumah dinas dinas. Realisasi pendapatan pada akun 425151 berasal dari kendaraan pengangkutan (forklift) dan sewa gedung dan bangunan (aula) dan realisasi pendapatan dari akun 425621 berasal dari pas masuk kendaraan TPI (roda 2/3,4,6) pas masuk aquarium dan wahana edukasi air, pas masuk orang wisata bahari, pas masuk kendaraan wisata bahari (2,4,6,8), pas masuk bus wisata bahari, tambat labuh, kebersihan kolam kapal perikanan, penggunaan kios wisata bahari, kebersihan kios/warung, pemakaian listrik dan air. Terdapat penurunan pendapatan pada akun 425999 karena pada tahun 2025 tidak ada lagi pengembalian penyalur dana bergulir.. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 36. RINCIAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik/ Turun	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.894.089	915.822	4.978.276	543,59
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	4.875.000	5.475.000	-600.000	-10,96
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1.127.306.012	821.759.574	281.505.673	37,18
Jumlah	1.138.075.110	1.318.232.263	-180.157.153	-13,67

Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 13,67. Hal tersebut disebabkan diantaranya oleh:

1. Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan bersumber dari sewa rumah dinas dinas sebanyak 2 unit;
2. Realisasi Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana turun 10,96%
3. Realisasi Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan berasal dari pas masuk kendaraan TPI (roda 2/3,4,6) pas masuk aquarium dan wahana edukasi air, pas masuk orang wisata bahari, pas masuk kendaraan wisata bahari (2,4,6,8), pas masuk bus wisata bahari, tambat labuh, kebersihan kolam kapal perikanan, penggunaan kios wisata bahari, kebersihan kios/warung, pemakaian listrik dan air.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp8.023.536.454

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.023.536.454 dan Rp5.940.346.188

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 35,07 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh adanya.. Sedangkan adanya penurunan uang makan PNS disebabkan adanya sejumlah PNS yang detasering di pelabuhan binaan dalam rangka penangkapan ikan terukur.. Rincian Beban Pegawai Semester II Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Penyebab kenaikan beban pegawai tersebut diantaranya karena:

1. kenaikan signifikan pada belanja pegawai PPPK. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan 15 orang PPPK dalam kurun waktu 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024 (6 orang per 1 Juli 2023, 7 orang per 1 Oktober 2023 dan 2 orang per 1 Maret 2024)
2. Adanya penambahan 6 orang PNS yang masuk dalam kurun waktu yang sama;
3. Adanya kebijakan pembayaran Tunjangan Kinerja 13 dan 14 yang pada tahun 2024 dibayarkan 100% sedangkan di tahun 2023 hanya 50%.

Rincian Beban Pegawai Semester II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 37. RINCIAN BEBAN PEGAWAI TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik/ Turun	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.157.885.400	1.957.488.440	200.396.960	10,24
Beban Pembulatan Gaji PNS	28.824	31.414	(2.590)	(8,24)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	175.189.810	158.518.120	16.671.690	10,52
Beban Tunj. Anak PNS	47.949.228	42.354.208	5.595.020	13,21
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	174.044.000	149.154.000	24.890.000	16,69
Beban Tunj. PPh PNS	15.052.146	3.430.088	11.622.058	338,83
Beban Tunj. Beras PNS	123.331.260	119.782.680	3.548.580	2,96
Beban Uang Makan PNS	263.175.000	291.780.000	(28.605.000)	(9,80)

Beban Tunjangan Umum PNS	52.705.000	59.610.000	(6.905.000)	(11,58)
Belanja Gaji Pokok PPPK	760.447.900	239.516.800	520.931.100	217,49
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	17.871	7.296	10.575	144,94
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	61.069.330	19.822.380	41.246.950	208,08
Belanja Tunjangan Anak PPPK	21.677.774	7.598.608	14.079.166	185,29
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	110.480.000	37.280.000	73.200.000	196,35
Belanja Tunjangan Beras PPPK	61.629.420	22.667.460	38.961.960	171,88
Belanja Uang Makan PPPK	109.941.000	52.625.000	57.316.000	108,91
Beban Uang Lembur	75.302.000	72.091.000	3.211.000	4,45
Belanja Uang Lembur PPPK	22.237.000	5.992.000	16.245.000	271,11
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.746.188.524	2.340.559.432	405.629.092	17,33
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.019.984.967	334.837.262	685.147.705	204,62
Jumlah Beban	8.023.536.454	5.940.346.188	2.083.190.266	35,07

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp121.757.250*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp121.757.250 dan Rp102.542.200

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 18,74 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh adanya peningkatan penggunaan alat tulis kantor akibat adanya tambahan pegawai baik PNS maupun P3K serta petugas pendataan yang walaupun pengelolaan honorariumnya ditarik ke pusat, namun operasional kegiatannya dibebankan ke PPN Pekalongan. . Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 38. RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik/ Turun	%
Beban Persediaan Konsumsi	121.757.250	102.542.200	19.215.050	18,74
Jumlah Beban	121.757.250	102.542.200	19.215.050	18,74

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp3.016.603.583

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.016.603.583 dan Rp4.436.861.091.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 35% dibandingkan dengan Tahun 2023 diantaranya disebabkan oleh:

1. Adanya perubahan kebijakan pembayaran honor kontrak perorangan petugas pendataan sebanyak 48 orang (penempatan di Pekalongan, Tegalsari, Bajomulyo, Klidang Lor dan Tasik Agung) yang awalnya dikelola anggarannya oleh satker, mulai tahun 2024 dilaksanakan oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 39. RINCIAN BEBAN BARANG DAN JASA TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik/ Turun	%
Beban Keperluan Perkantoran	431.970.863	445.918.376	(13.947.513)	(3,13)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	108.168.000	187.368.000	(79.200.000)	(42,27)
Beban Barang Operasional Lainnya	173.899.200	254.985.339	(81.086.139)	(31,80)
Beban Honor Output Kegiatan	40.000.000	50.510.000	(10.510.000)	(20,81)
Beban Langganan Listrik	204.858.203	197.550.078	7.308.125	3,70
Beban Langganan Telepon	122.188.267	111.599.914	10.588.353	9,49
Beban Langganan Air	4.268.760	-	4.268.760	-

Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9.400.164	-	9.400.164	-
Beban Jasa Pos dan Giro	-	2.872.000	(2.872.000)	(100,00)
Beban Sewa	16.150.000	33.571.000	(17.421.000)	(51,89)
Beban Jasa Profesi	5.700.000	4.400.000	1.300.000	29,55
Beban Jasa Lainnya	1.430.429.648	2.629.702.717	(1.199.273.069)	(45,60)
Beban Keperluan Perkantoran	-	445.918.376	(13.947.513)	(3,13)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2.547.033.105	187.368.000	(79.200.000)	(42,27)
Beban Barang Operasional Lainnya	431.970.863	254.985.339	(81.086.139)	(31,80)
Jumlah Beban	2.547.033.105	3.918.477.424	(1.371.444.319)	(35,00)

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp1.925.917.184*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.925.917.184 dan Rp2.605.811.152.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,09% dibandingkan dengan Tahun 2023, diantaranya disebabkan oleh:

1. Adanya penghentian penggunaan BMN atas Peralatan dan mesin (Suction Dredger 1 Unit, Excavator 1 Unit, Tongkang Bermotor 1 Unit, Sweeper Rotary 1 Unit, Jeep 1 Unit, Pick Up 1 Unit, Kendaraan Roda 3 dan Sepeda Motor 5 Unit) mulai dari Bulan Oktober 2023 serta Bangunan TPI Permanen 1 Unit dan Jaringan Sambungan ke Rumah Kapasitas Sedang 1 Unit mulai bulan Juli 2023.
2. Adanya 65 unit Alsin non TIK yg dihentikan penggunaannya

Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 40. RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik/ Turun	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158.107.000	107.012.000	51.095.000	47,75
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	602.117.100	510.738.000	91.379.100	17,89
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	907.053.434	1.364.001.652	(456.948.218)	(33,50)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	64.810.000	226.155.000	(161.345.000)	(71,34)
Beban Pemeliharaan Irigasi	83.990.000	297.033.000	(213.043.000)	(71,72)
Beban Pemeliharaan Jaringan	109.839.650	100.871.500	8.968.150	8,89
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-	-
Jumlah Beban	1.925.917.184	2.605.811.152	(679.893.968)	(26,09)

Rincian barang yang dipelihara adalah sebagai berikut:

Tabel 41. RINCIAN GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DIPELIHARA

No.	Gedung yang dipelihara
1	Gedung kantor/bangunan gedung permanen
2	Balai Pertemuan Nelayan/Bangunan Gedung Pertemuan Permanen

Tabel 42. RINCIAN GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA

No.	Gedung yang dipelihara
1	Gedung Laboratorium Mini (Gedung Laboratorium Permanen)
2	Gedung Pertemuan Wisata Bahari (Gedung Pertemuan Permanen)
3	Ruang Genset (Gudang Tertutup Permanen)
4	Gedung Kantor (Gudang Tertutup Permanen)
5	Pos Terpadu (Gedung Pos Jaga Permanen)
6	Taman Wisata Bahari (Taman Permanen)
7	Depo Logistik (Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen)
8	Wahana Edukasi Air (Gedung Olahraga Kolam Renang)
9	Bangunan Navigasi Mercusuar (Menara Suar Listrik Non Diesel)
10	Pagar Batas Wisata Bahari (Tanda Batas Administrasi Kepemilikan) (Pagar Barat)
11	Pos Satpam II (Timur Sungai/Pos Jaga Permanen)
12	Tempat Parkir Kantor PPNP (Gedung Garasi/Pool Permanen)
13	Ikon Wisata Bahari (Bangunan Terbuka Lainnya)
14	Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan/Rumah Negara Gol.I Tipe C Permanen
15	Papan Nama (Tugu Tanda Batas Administrasi Kepemilikan)
16	Kantin Wisata Bahari/Kios Waserda (Gedung Pertokoan)
17	Pemeliharaan Gedung SWRO
18	Plengsengan Belakang Kantor/Timur (Bangunan Pembawa Pengaman Sungai)
19	Bangunan Gedung Instalansi Lainnya (Tempat Penampungan Sampah)
20	Pagar Permanen (Pagar BRC)
21	Gedung Akuarium
22	Gazebo (Bangunan Gedung Terbuka) 8 Unit x 4 m2
23	Pos Jaga Wisata Bahari (Gedung Pos Jaga Permanen)

24	Pos Jaga Wisata Bahari (Gedung Pos Jaga Permanen Rumah Dinas WR. Supratman (Rumah Nagara Gol. I Tipe D Permanen)
25	Pos Satpam TPI (Gedung Pos Jaga Permanen)

Tabel 43. RINCIAN PERALATAN DAN MESIN YANG DIPELIHARA

No.	Peralatan dan Mesin yang dipelihara
1	Jaringan LAN
2	Pompa Air
3	Genset
4	Mesin Potong Rumput
5	Pesawat TV
6	Gerobak Sampah
7	Sound System
8	(Service dan Pengisian) Tabung Pemadam Kebakaran
9	LCD Proyektor
10	CCTV
11	AC Split
12	Running Text
13	Penyemprot Air Bertekanan Tinggi
14	Solar Cell
15	Neon Box/Papan Nama/Papan Visual
16	Peralatan Mainan (Peralatan Permainan Lainnya)
17	Chainsaw
18	Alat Komunikasi
19	Scanner
20	Walkthrough/Portal Metal Detector (Portal Gate Wisata Bahari)
21	Pemeliharaan Video Conference
22	Kendaraan Roda 4
23	Kendaraan Roda 4 Double Gardan (Hilux/G-9584-BA)
24	Kendaraan Roda 3
25	Kendaraan Roda 2
26	Dump Truck Sampah
27	Air Conditioning/AC Central
28	Forklift
29	Truck Crane
30	Komputer/Notebook
31	Printer
32	PABX
33	Meubelair

Tabel 44. RINCIAN JALAN DAN JEMBATAN YANG DIPELIHARA

No.	Gedung yang dipelihara
1	Dermaga Jetty (Gardu Pandang)
2	Dermaga Timur

Tabel 45. RINCIAN IRIGASI YANG DIPELIHARA

No.	Gedung yang dipelihara
1	MCK Wisata Bahari
2	MCK TPI
3	Drainase Kawasan

Tabel 46. RINCIAN JARINGAN YANG DIPELIHARA

No.	Gedung yang dipelihara
1	Jaringan Listrik
2	Instalasi Air Bersih
3	Jaringan SWRO

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp808.643.370

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp808.643.370 dan Rp1.223.403.450

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 17,47% diantaranya disebabkan oleh adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online (*zoom*) maupun hibrid sehingga peserta kegiatan tidak harus menghadiri secara langsung (*offline*).

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 47. RINCIAN BEBAN PERJALANAN DINAS TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Beban Perjalanan Biasa	642.440.717	1.055.369.534	(412.928.817)	(39,13)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000	5.000.000	(1.000.000)	(20,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35.800.000	53.000.000	(17.200.000)	(32,45)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	126.402.653	110.033.916	16.368.737	14,88
Jumlah Beban	808.643.370	1.223.403.450	(414.760.080)	(33,90)

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp3.211.607.316

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.211.607.316 dan Rp2.926.173.338.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 48. RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TA 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	712.630.511	427.758.515	284.871.996	66,60
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	520.852.136	514.211.904	6.640.232	1,29
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	667.682.471	899.784.434	(232.101.963)	(25,80)
Beban Penyusutan Irigasi	924.199.456	681.356.611	242.842.845	35,64
Beban Penyusutan Jaringan	386.242.742	387.561.667	(1.318.925)	(0,34)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	15.500.207	(15.500.207)	(100,00)
Jumlah Penyusutan	3.211.607.316	2.926.173.338	285.433.978	9,75
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Jumlah Beban	3.211.607.316	2.926.173.338	285.433.978	9,75

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp3.303

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.303 dan Rp1.883

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 49. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Uraian Jenis Beban	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	3.303	1.883	75,41
Jumlah	3.303	1.883	75,41

D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

*Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp-
224.627.221*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-224.627.221 dan Rp-81.579.744

Tabel 50. SURPLUS (DEFISIT) PENJUALAN ASET NON LANCAR

Uraian Jenis Beban	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	%
Pendapatan Pelepasan Aset	360.025.990	28.599.999	~
Beban Pelepasan Aset	(584.653.211)	(110.179.743)	431
Jumlah	(224.627.221)	(81.579.744)	431

D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Surplus (Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp2.354.711*

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.354.711 dan Rp1.960.481..

Tabel 51. SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Uraian Jenis Beban	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	376.691	1.960.481	(80,79)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.978.020	~	~
Jumlah	2.354.711	1.960.481	20,11

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp71.854.839.811

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp71.854.839.811 dan Rp72.006.666.964.

E.2 Surplus/Defisit-LO

Defisit LO
Rp16.192.265.860

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.192.265.860,00 dan Rp15.996.526.302,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp0

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset
Rp0

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.4.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp133.118.000

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp133.118.000 dan Rp44.815.500.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 52. RINCIAN KOREKSI ASET NON REVALUASI TA 2024

(dalam Rupiah)

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133.118.000
Jumlah	133.118.000

E.4.4 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain Rp1.883

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.883 dan Rp.9.802.

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi ini adalah merupakan koreksi atas penyisihan piutang tak tertagih senilai Rp.1.883,- atas pencatatan piutang lainnya tahun 2023 (pengembalian tukin dan uang makan Bulan Desember 2023 yang dibayar bulan Januari 2024). Koreksi Lain-Lain terdiri dari:

Tabel 53. RINCIAN KOREKSI LAIN-LAIN TA 2024

(dalam Rupiah)

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Lainnya	1.833
Jumlah	1.833

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp16.226.305.155

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.16.226.305.155 dan Rp.15.195.957.239.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian / Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Tabel 54. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS TA 2024

(dalam Rupiah)

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	14.874.723.113
Ditagikan ke Entitas Lain	(1.353.864.558)

Transfer Masuk	(8.091.900)
Transfer Keluar	2.713.538.500
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	16.226.305.155

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL Rp0
DDKEL Rp0

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN)

Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 14.874.723.113, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 1.353.864.558.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk
Rp2.739.426.600

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp-8.091.900 terdiri dari Televisi ke Satker Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan BAST No. B.2569/PPN.PKL/PL.450/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024.

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.747.518.500 yang terdiri dari :

Tabel 55. TRANSFER MASUK TA 2024

(dalam Rupiah)

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Excavator	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	1.979.000.000
2	Sepeda Motor	Sekretariat Jenderal Perikanan Tangkap	19.900.000
3	Ponton	Sekretariat Jenderal Perikanan Tangkap	734.538.500
4	Brangkas	Sekretariat Jenderal Perikanan Tangkap	14.080.000
Jumlah			2.747.518.500

E.5.3 Pengesahan Hibah dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pos Luar Biasa Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak

terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp72.021.999.999

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp72.021.999.999 dan Rp70.962.064.860.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

1. Telah diterbitkan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dokumen Nomor : S-26/MK.6/KNL.0903/2024 Tanggal 2 Juli 2024 berupa 12 unit kendaraan bermotor roda 4 dan 2 dengan nilai perolehan Rp.806.742.000,- (dokumen terlampir).

F.2 Pengungkapan Lain-lain

1. Semua tindak lanjut atas temuan BPK RI Nomor 38/LHP/XVII/02/2009 tanggal 24 Februari 2009 atas Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, TPI Higienis dan jaringan listrik TPI Higienis, telah disampaikan dan dinyatakan tuntas oleh Tim BPK (*screenshot* aplikasi auditee terlampir).
2. Sebagai tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : R.153/ITJ.2/HP.130/VI/2024 Tanggal 3 Juni 2024, telah disampaikan dan dinyatakan tuntas oleh Tim Inspektorat Jenderal (*screenshot* aplikasi SIDAK terlampir).
3. Dalam rangka pengimplementasian Pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK No.17/PMK.09/2019 telah ditetapkan 5 (lima) akun signifikan di PPN Pekalongan yakni 425621 (Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan - Tambat Labuh), 132111 (Peralatan dan Mesin), 114311 (Pendapatan Yang Masih Harus Diterima), 111711 (Kas di Bendahara Penerimaan) dan 111611 (Kas di Bendahara Pengeluaran).

Dari kelima akun signifikan tersebut, pada bulan agustus PPN Pekalongan telah menyampaikan hasil pengujian pengendalian tingkat entitas (Tabel B.1) dan Pengendalian Umum Teknologi dan Informasi (Tabel B.2) beserta dokumen pendukungnya. Pengujian PITE pada Tabel B.1 dilakukan menggunakan 2 teknik yaitu teknik survei dan teknik reviu dokumen. PPN pekalongan telah melaksanakan teknik survei dengan jumlah responden 30 pegawai yang terdiri dari Kepala Unit Kerja, PPK, PPSPM, Bendahara, Penyusun Laporan Keuangan dan BMN, Tim SPIP PPN Pekalongan dan Perwakilan Pegawai dengan hasil rata-rata 30,83. Sedangkan untuk teknik reviu dokumen juga telah dipenuhi oleh PPN Pekalongan. Berdasarkan teknik survei dan teknik dokumen yang telah dilaksanakan perolehan nilai entitas PPN Pekalongan sebesar 90 % dengan kategori tinggi. Pengujian PUTIK pada tabel B.2 dilaksanakan dengan reviu dokumen pada pengendalian utama area akses logical dan area operasional teknologi dan informasi dan komunikasi dengan

hasil efektif. Pada bulan oktober PPN Pekalongan masih melakukan pemenuhan dokumen pendukung pengendalian utama dari tabel A yang merupakan proses pengujian tingkat entitas (Tabel C.1) dan Pengendalian Umum TIK (tabel C.2).

Berdasarkan hasil review dari Inspektorat Jenderal terkait dokumen pendukung PIPK Tahun 2024, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh PPN Pekalongan yaitu 1) kekurangan bukti dukung pada tabel B1; 2) melengkapi daftar responden dengan nama responden; 3) melengkapi kolom hasil penelitian lanjutan yang mendapat nilai 0 sesuai catatan hasil revidi; 4) menginput nomor dokumen pada tabel C1; 5) menambahkan skor 0 yang berasal dari Tabel B.1 ke dalam Tabel D dan selanjutnya melakukan penelitian. Kelima hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPN Pekalongan sehingga pengendalian intern atas pelaporan keuangan mendapatkan penilaian efektif dengan kesimpulan memadai dalam arti tidak terdapat kelemahan material atau kelemahan signifikan.